

# **Implementasi Kebijakan Penanganan Anak Jalanan di Kota Yogyakarta**

Oleh :

Ayu Isrovani Pratiwi, Sundarso, Zainal Hidayat

**Jurusan Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro**

Jalan Prof Soedharto SH, Kampus Tembalang, Semarang

Email: [ayuisrovanipratiwi@yahoo.co.id](mailto:ayuisrovanipratiwi@yahoo.co.id)

## **Abstract**

Policy implementation of street children handling is one of the effort made by the government to remove the children lived in the street by fulfill their rights. Policy implementor are Social Service, Labour and Transmigration of Yogyakarta and the Association of Social Worker Yogyakarta.

The purposes of this research are to analyze the process of policy implementation of street children handling and factors that support and hinder policy implementation of street children handling in Yogyakarta city. The effectiveness of the policy implementation process viewed from 4 factors: appropriateness of the policy, the accuracy of the executor, the target accuracy, and precision of the environment. For enabling and inhibiting factors using the theory of Van Meter and Van Horn are standard and policy objectives, resources, communication between organizations and implementing activities, the characteristics of the implementing agency, social, political, and economic environment and disposition implementor. This study used a qualitative approach with descriptive type of research, because research aimed to illustrate how the process of policy implementation of street children handling performed deeply by the facts. Analysis of this research were field observation, interview, and literature study. Then doing reduction data, data presentation, and drawing conclusions based on the analysis and presentation of data.

The results of this research wasn't able to solve the existing problems of street children yet, but able to reduced the number of street children. The inhibiting factors were funds, private role, social and economic environment of Yogyakarta city.

**Keywords: Implementation, Policy, Street Children**

## 1. PENDAHULUAN

Anak jalanan merupakan salah satu permasalahan publik yang ada di Indonesia. Kota Yogyakarta merupakan salah satu contoh kota yang ada di Indonesia yang mengalami dilema atas permasalahan anak jalanan, Kota Yogyakarta yang merupakan kota wisata menjadikan wilayah tumbuh dan berkembangnya komunitas anak jalanan dari daerah-daerah di sekitarnya.

Bertambah banyaknya jumlah anak jalanan yang ada di Kota Yogyakarta ini tentu saja mengganggu kondisi masyarakat yang ada di Kota Yogyakarta dan juga menimbulkan dampak seperti keresahan yang timbul di masyarakat. Kebijakan penanganan anak jalanan proses implementasinya masih mengalami kendala yaitu ketika dilakukan upaya sapaan dan penjangkauan sering kali terkendala dengan pemberdaya anak jalanan sehingga sering menimbulkan konflik antara implementor kebijakan dengan pemberdaya anak jalanan dan anak-anak yang diberikan pembinaan adalah anak-anak yang sebelumnya pernah mendapatkan pembinaan.

Penelitian implementasi kebijakan publik ini bertujuan untuk menganalisis bagaimanakah implementasi kebijakan penanganan anak jalanan di Kota Yogyakarta dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi proses implementasi kebijakan penanganan anak jalanan di Kota Yogyakarta.

Berdasarkan pertanyaan dan tujuan, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn dan prinsip

empat tepat Riant Nugroho. Prinsip empat tepat tersebut dilihat dari ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksana, ketepatan target, dan ketepatan lingkungan. Sedangkan untuk faktor pendukung dan penghambat berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, disposisi, lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

## METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif, karena penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menggambarkan bagaimana proses implementasi kebijakan secara mendalam dengan melihat fakta-fakta yang ada. Situs penelitian dalam implementasi kebijakan penanganan anak jalanan yaitu Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dan Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kota Yogyakarta.

Peneliti menggunakan teknik pemilihan informan dengan *purposive sampling*. Pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, atau mungkin dia merupakan penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek dan situasi sosial yang diteliti. Informan dalam penelitian ini adalah staff dinas sosial dan anggota ikatan pekerja sosial masyarakat.

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari sumbernya melalui kegiatan wawancara dengan informan, baik wawancara secara lisan maupun tulisan dan data sekunder yaitu data yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya. Dapat diperoleh dari literatur-literatur, data, laporan-laporan, dokumen-dokumen terdahulu yang berkaitan dengan fenomena penelitian.

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah melakukan analisis dan interpretasi data melalui reduksi data, kemudian data yang sudah dipilah disajikan dan ditarik kesimpulan dengan menggunakan analisis domain. Kualitas dan keabsahan data dapat dilihat dari informasi yang diperoleh dari informan dengan hasil dari observasi di lapangan.

## **2. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Proses Implementasi Kebijakan Penanganan Anak Jalanan di Kota Yogyakarta**

#### **1. Ketepatan Kebijakan**

Ketepatan kebijakan ini melihat apakah pelaksanaan penanganan anak jalanan di Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2011 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu ketepatan kebijakan juga melihat apakah cara-cara penanganan yang dijelaskan di dalam perda merupakan langkah yang tepat di dalam memecahkan permasalahan anak jalanan di Kota Yogyakarta. Peraturan Daerah No 6 Tahun 2011 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di dalamnya menjelaskan cara penanganan anak jalanan yang terdiri

dari upaya sapaan dan penjangkauan, pembinaan dan pendampingan. Kebijakan penanganan anak jalanan di Kota Yogyakarta dilakukan sesuai dengan isi dalam perda ini yaitu melakukan sapaan dan penjangkauan untuk melihat apakah ada aktivitas anak jalanan di jalan, lalu mendata. Kemudian, melakukan pembinaan dengan memberikan pelatihan, lalu terakhir adalah pendampingan untuk memantau perkembangan dari anak tersebut apabila dikemudian hari ditemukan kesulitan setelah dilakukan pembinaan. Kebijakan ini dirasakan tepat karena pada prosesnya menggunakan pendekatan manusiawi tidak melalui kekerasan. Karena dengan cara seperti ini kita bisa mendekati anak jalanan dan anak jalanan mau terbuka, sehingga mereka merasa dipedulikan dan tidak merasa terasingkan. Akan tetapi penanganan seperti ini tidak memiliki pengaruh terhadap jumlah anak jalanan yang ada di Kota Yogyakarta.

#### **2. Ketepatan pelaksana**

Ketepatan pelaksana dalam hal ini melihat yaitu pertama, siapa aktor pelaksana dari kebijakan penanganan anak jalanan ini dan kedua, apakah aktor kebijakan penanganan anak jalanan ini memang orang-orang yang tepat mengerti tentang permasalahan anak jalanan.

Aktor pelaksana dari kebijakan penanganan anak jalanan di Kota Yogyakarta adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta bekerjasama dengan Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kota Yogyakarta. Ikatan pekerja sosial masyarakat dipilih oleh dinas sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi sebagai pelaksana lapangan kebijakan penanganan anak jalanan

karena mereka merupakan mitra pemerintah di dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Selain itu pekerja sosial masyarakat ini merupakan perencana atau inisiator dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dan juga pelaksana dan pengorganisasi program dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa ikatan pekerja sosial masyarakat merupakan pelaksana yang tepat di dalam implementasi kebijakan penanganan anak jalanan di Kota Yogyakarta. Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial No 01 Tahun 2012 Tentang Pekerja Sosial Masyarakat ikatan pekerja sosial masyarakat memang mitra yang tepat bagi pemerintahan di dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pekerja sosial masyarakat dimana mereka merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki jiwa kepedulian yang tinggi terhadap permasalahan kesejahteraan sosial menjadikan mereka memahami betul bagaimana kondisi wilayah mereka karena mereka berasal dari wilayah masing-masing baik kelurahan maupun kecamatan. Sehingga mereka mengerti tentang permasalahan-permasalahan sosial apa saja yang ada di daerahnya termasuk permasalahan anak jalanan.

### **3. Ketepatan Target**

Ketepatan target dalam hal ini berkenaan dengan tiga hal. Pertama, apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan. Kedua, apakah targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi, ataukah tidak. Ketiga, apakah intervensi implementasi kebijakan

bersifat baru atau memperbarui implementasi kebijakan sebelumnya.

Berdasarkan hasil penelitian target kebijakan penanganan anak jalanan di Kota Yogyakarta ini sudah tepat. Hal ini sesuai dengan isi Peraturan Daerah No.6 Tahun 2011 Provinsi DIY yang kemudian dibuktikan dengan data anak jalanan yang diperoleh dari Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat.

*Kedua*, melihat apakah target di dalam menerima kebijakan penanganan anak jalanan di Kota Yogyakarta sudah siap untuk diintervensi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan anak jalanan yang mendapatkan penanganan ini tidak semuanya dalam keadaan siap untuk diintervensi. Hal ini dilihat dari dukungan yang diberikan oleh orangtua dari anak jalanan ini.

*Ketiga*, yaitu sifat kebijakan penanganan anak jalanan di Kota Yogyakarta bukanlah sebuah kebijakan baru. Berdasarkan studi literatur kebijakan ini merupakan tuntutan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Kemudian dalam Peraturan Daerah No.6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan menyebutkan bahwa sebagai akibat kondisi perkembangan sosial di masyarakat menyebabkan sebagian anak-anak terpaksa hidup di jalan.

### **4. Ketepatan Lingkungan**

Lingkungan kebijakan di dalamnya melihat bagaimana lingkungan endogen dan eksogen implementasi kebijakan penanganan anak jalanan

di Kota Yogyakarta. Pertama, lingkungan endogen melihat bagaimana hubungan diantara para implementor kebijakan di dalam penanganan anak jalanan di Kota Yogyakarta. Selain itu juga untuk mengetahui apakah pernah terjadi konflik di dalam lingkungan implementor kebijakan.

Pertama, lingkungan endogen. Berdasarkan hasil penelitian hubungan diantara implementor kebijakan dalam hal ini adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dengan Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan komunikasi yang selalu terjalin dengan rutin di dalam pelaksanaannya sehingga tidak pernah menimbulkan konflik atau pertentangan. Komunikasi yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung dilakukan setiap melakukan kegiatan di lapangan tidak hanya ketika terjadi permasalahan di dalam pelaksanaan penanganan. Sedangkan hubungan dengan unsur-unsur yang lain masih dirasakan belum efektif. Hal ini dikarenakan belum adanya komunikasi yang valid yang terjalin diantara semua unsur baik dengan dinas-dinas terkait dan juga unsur-unsur yang lain seperti akademisi dan masyarakat. Belum pernah diadakannya sebuah forum untuk duduk bersama yang melibatkan

semua unsur untuk melakukan diskusi membahas permasalahan anak jalanan ini secara bersama-sama.

Kedua, lingkungan eksogen. Lingkungan eksogen ini menjelaskan persepsi atau pendapat publik terkait kebijakan penanganan anak jalanan di Kota Yogyakarta. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa publik memberikan respon yang positif dari kebijakan penanganan anak jalanan di Kota Yogyakarta. Masyarakat sudah mulai menyadari dengan memberikan uang atau recehan di jalanan itu bukanlah hal yang baik akan tetapi dengan menyalurkannya ke lembaga-lembaga yang lain itu merupakan cara yang tepat di dalam menolong anak jalanan. Sudah mulai berkurangnya pengguna jalan yang memberikan uang di jalan membuat mereka tidak lagi melakukan aktivitas di perempatan lampu merah. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan dilampu merah arah ke Malioboro dari Stasiun Tugu pada siang hari terdapat anak jalanan yang mengemis. Mereka meminta-minta kepada pengguna jalan dan terlihat respon positif dari para pengguna jalan dimana kebanyakan dari mereka tidak memberikan uang kepada anak jalanan tersebut walaupun masih terlihat ada beberapa pengguna jalan yang memberikan.

### 3.2 Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Kebijakan

Tabel 1 Faktor- Faktor yang Mendukung dan Menghambat Implementasi Kebijakan Penanganan Anak Jalanan di Kota Yogyakarta

No	Faktor yang mendukung	Faktor yang menghambat
1.	Tersedianya standar berupa regulasi hukum di dalam penanganan anak jalanan yaitu Peraturan Daerah No.6 Tahun 2011 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Keterbatasan anggaran dana di dalam kebijakan penanganan anak jalanan menyebabkan pembinaan anak jalanan kurang efektif
2.	Sasaran dari kebijakan penanganan anak jalanan sudah jelas dan dipahami oleh pelaksana kebijakan	Belum adanya peranan perusahaan swasta dalam kebijakan penanganan anak jalanan
3.	Jumlah pelaksana kebijakan sudah mencukupi tidak mengalami kekurangan personil dan juga pelaksana kebijakan aktif di dalam pelaksanaannya.	Lingkungan sosial keluarga anak jalanan di Kota Yogyakarta menyebabkan anak turun ke jalan
4.	Tersedianya pelatihan yang diberikan baik dari pihak Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta maupun Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kota Yogyakarta	Lingkungan ekonomi Kota Yogyakarta menjadi daya tarik anak jalanan dari berbagai daerah
5.	Tersedianya sarana dan prasarana untuk pelatihan pembinaan anak jalanan.	
6.	Proses komunikasi yang dilakukan dengan pembuatan papan himbauan, brosur, dan sosialisasi tingkat kelurahan	
7.	Respon masyarakat sudah baik di dalam mendukung kebijakan penanganan anak jalanan di Kota Yogyakarta	
8.	Tersedianya SOP yang jelas sehingga memudahkan pelaksana kebijakan	
9.	Adanya pengawasan yang dilakukan baik dari pihak Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta maupun Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kota Yogyakarta terhadap pelaksana kebijakan di lapangan	
10.	Koordinasi yang terjalin antara Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dan Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kota Yogyakarta berjalan dengan baik dan rutin dengan adanya rapat mingguan	
11.	Terdapat peranan aktor politik di dalam mendukung kebijakan penanganan anak jalanan di Kota Yogyakarta	

### **3. PENUTUP**

#### **KESIMPULAN**

1. Proses implementasi kebijakan penanganan anak jalanan di Kota Yogyakarta dilihat berdasarkan prinsip empat tepat yaitu ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksana, ketepatan target, dan ketepatan lingkungan sudah cukup baik dan sesuai dengan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2011 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun kebijakan penanganan anak jalanan yang ada di Kota Yogyakarta tidak memiliki pengaruh terhadap jumlah penanganan anak jalanan yang ada di Kota Yogyakarta. Adapun permasalahan lainnya yaitu keluarga anak jalanan yang mendapatkan penanganan tidak semuanya mendukung kebijakan ini dan belum adanya komunikasi yang dilakukan secara efektif terhadap unsur-unsur lain seperti dinas-dinas terkait dan juga perusahaan swasta.
2. Faktor penghambat kebijakan antara lain: (1) Keterbatasan anggaran dana (2) Belum adanya peranan perusahaan swasta (3) Lingkungan sosial keluarga anak jalanan menyebabkan anak turun ke jalan; (4) Lingkungan ekonomi Kota Yogyakarta menjadi daya tarik anak jalanan dari berbagai daerah.

#### **SARAN**

1. Perlu adanya upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendapatkan dana tambahan dari pihak lain seperti bekerjasama dengan perusahaan swasta yang

- ada di Kota Yogyakarta melalui program *Corporate Social Responsibility* untuk lingkungan sekitar. Sehingga dana penanganan kebijakan anak jalanan tidak hanya terbatas dari APBD Kota, Provinsi, dan APBN.
2. Perlu adanya komunikasi yang dibangun antara pemerintah dengan perusahaan swasta dengan mengadakan suatu forum untuk duduk bersama yang dihadiri oleh semua pihak untuk berdiskusi membahas permasalahan anak jalanan di Kota Yogyakarta beserta solusinya.
  3. Perlu adanya kesesuaian antara program kebijakan penanganan anak jalanan dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Yogyakarta sehingga anak jalanan yang mendapatkan penanganan, orangtuanya pun mendapatkan bantuan perekonomian sehingga tidak menyebabkan anak ini melakukan aktivitas di jalan.
  4. Perlu adanya kerjasama yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta seperti memberikan kegiatan yang bermanfaat bagi anak-anak jalanan yang datang ke kota dengan memberikan pelatihan-pelatihan seni baik berupa seni tari, wayang ataupun gamelan yang kemudian oleh dinas pariwisata dan kebudayaan dibantu untuk dipromosikan mengisi acara-acara baik acara yang dilakukan oleh pemerintah ataupun masyarakat luas.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-negara. Berkembang.* Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Emzir. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data.* Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Saebani, Beni Ahmad. 2008. *Metode Penelitian.* Bandung : CV Pustaka Setia
- Semiawan, Conny R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif.* Jakarta: PT. Grasindo
- Subarsono, AG. 2004. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi.* Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Administrasi.* Bandung : Alfabeta.
- Wahab, Sholichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijakan.* Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2007. *Teori dan Proses Kebijakan Publik.* Yogyakarta: MedPress
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus.* Yogyakarta : CAPS